

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Jombang



# RENSTRA RENCANA STRATEGIS



2024-2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Dokumen ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, kegiatan dan sub kegiatan.

Harapan kami semoga dokumen ini dapat menjadi sarana dalam membangun kebersamaan, sinergitas serta komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keberhasilan penyusunan renstra akan terlihat pada upaya mengimplementasikan renstra itu sendiri dalam tindakan yang nyata.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jombang, 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
KABUPATEN JOMBANG**



**SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, SSTP, M. Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 200003 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>Bab II. Gambaran Pelayanan DPMD Kab. Jombang .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	12
2.2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan TUPOKSI .....	12
2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan .....	12
2.2.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
2.2.4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan .....	13
2.2.5 Rekapitulasi Inventarisasi Kantor .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	46
<b>Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis DPMD Kab. Jombang .....</b>	<b>48</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	48
3.2 Isu Strategis.....	48
<b>Bab IV. Tujuan dan Sasaran DPMD Kab. Jombang .....</b>	<b>49</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	49
4.2 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	51
<b>Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan DPMD Kab. Jombang .....</b>	<b>58</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi .....	58
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri.....	61
5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2019-2024 .....	62
5.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 2024-2026 .....	63
<b>Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan .....</b>	<b>66</b>
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	66
<b>Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>100</b>
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	100
<b>Bab VIII. Penutup.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan TUPOKSI .....	12
Tabel 2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan .....	12
Tabel 2.2.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	12
Tabel 2.2.4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan .....	13
Tabel 2.2.5 Rekapitulasi Inventarisasi Kantor.....	13
Tabel TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur (2018-2023) .....	16
Tabel TC.23 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur (2018-2023) .....	35
Tabel T-C.25 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang .....	50
Tabel 4.2 Cascading Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kab. Jombang Tahun 2024-2026 .....	51
Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.....	59
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 2024-2026 .....	64
Tabel TC.27 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Pagu Indikatif Renstra 2024-2026 .....	67
Tabel TC.27 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Pagu Indikatif Renstra 2024-2026 Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah .....	81
Tabel TC.28 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026.....	100

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang  
..... 11



# BAB I PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 akan habis pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Jombang yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 2024-2026 disusun sebagai acuan/pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2024-2026.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 20/D);
12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang nomor: 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Jombang secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahunan selama tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan RPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Penjabat (PJ) Bupati Jombang ke dalam perencanaan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
4. Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang (Renja PD).

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD KAB. JOMBANG
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD KAB. JOMBANG
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 3.2 Isu Strategis
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN DPMD KAB. JOMBANG
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026
  - 4.2 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMD KAB. JOMBANG
- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi
  - 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kementrian Dalam Negeri
  - 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2019-2024
  - 5.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 2024-2026
- Bab VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD
- Bab VIII : PENUTUP



# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN JOMBANG**

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D). Sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat, mempunyai fungsi:
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
5. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
7. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
9. Pengelolaan aset;
10. Pengelolaan kearsipan;
11. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
13. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) di lingkup Dinas;
14. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
15. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan

16. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

17. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

18. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi pengolahan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengolah barang-barang inventaris kantor;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran dinas;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

17. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Tugas pokok Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Peguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun kebijakan dan program di Bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan sosial budaya serta dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

- b. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelambagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong, masyarakat desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 18. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan, dan kerja sama desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- b. Fasilitasi pelaksanaan program bantuan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan desa, sesuai pedoman, prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah desa;
- c. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam kabupaten dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan lembaga ekonomi desa;
- e. Pembinaan dan evaluasi pengembangan kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 19. Bidang Pembangunan Desa

Bidang pembangunan desa melakukan tugas, membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan program dibidang pembangunan desa dan penataan desa;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi penataan desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi dibidang pembangunan dan penataan desa;
- d. Pemantauan dan evaluasi dibidang pembangunan dan penataan desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan (RPJM dan RKP desa);
- f. Pembinaan pelaksanaan musyawarah desa;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana desa;
- h. Pembinaan perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Indeks Desa Mambangun (IDM) dan SDGs Desa;

- i. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM);
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 20. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa melaksanakan tugas, membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan program dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan batas desa;
- b. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa, profil desa, dan lomba desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa, produk hukum desa;
- d. Penyelenggaraan pemuilhan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- e. Pembinaan pelaksanaan pengangkatan pemberhentian perangkat desa;
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- g. Pembinaan penyusunan laporan Kepala Desa;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 21. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Kepala DPMD Kabupaten Jombang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kasubag sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR: 78**  
**TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 30 Desember 2021**



———— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI JOMBANG,**  
**ttd**  
**MUNDJIDAH WAHAB**

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh pegawai sebanyak pegawai sebanyak 37 orang dengan rincian 29 orang PNS, 8 (delapan) orang tenaga Honorer (Non PNS). Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah 90 Orang, dengan demikian baru terpenuhi 33,3%. Data mengenai komposisi sumber daya aparatur yang tersedia pada Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Jombang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan TUPOKSI

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan TUPOKSI

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	SEKRETARIAT	10	5
2	BIDANG PEM	4	1
3	BIDANG PKPM	3	1
4	BIDANG BINA PEMDES	7	1
5	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	5	-
<b>J U M L A H</b>		29	8

Sumber : DPMD Tahun 2023

### 2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

Tabel 2.2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
1	IV	5	2	-	-	7
2	III	2	5	1	10	18
3	II	-	-	2	3	4
4	I	-	-	-	-	0
<b>J U M L A H</b>						<b>29</b>

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2023

### 2.2.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.3 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	8
2	Sarjana S1/D-IV	16
3	D3	1
3	SMA (Sederajat)	4
4	SMP (Sederajat)	-
<b>J U M L A H</b>		<b>29</b>

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2023

## 2.2.4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2.4 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
1	Kepala DPMD (Eselon II/b)	1
2	Sekretaris (Eselon III/a)	1
3	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4
4	Kasi / Kasubag (Eselon IV/a)	2
5	Fungsional Tertentu	8
6	Fungsional Umum	13
<b>J U M L A H</b>		29

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah rekapitulasi inventaris ataupun sarana prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam menunjang kinerja aparatur/pegawai.

## 2.2.5 Rekapitulasi Inventarisasi Kantor

Tabel 2.2.5 Rekapitulasi Inventarisasi Kantor

NO	JENIS BARANG/GEDUNG	JUMLAH/LUAS	SATUAN	KONDISI	
				KURANG BAIK/RUSAK	BAIK
1	Kendaraan Roda 4	5	Unit	1	4
2	Kendaraan Roda 2	15	Unit	9	6
3	Mesin Ketik Manual	1	Buah	1	0
4	Lemari Besi	30	Buah	2	28
5	Lemari Kayu	21	Buah		21
6	Rak Besi	2	Buah		2
7	Filing Kabinet	21	Buah		21
8	Penghancur Kertas	1	Buah		1
9	LCD Proyektor/Infocus	2	Buah		2
10	Back Drop	1	Buah		1
11	Meja Rapat	11	Buah		11
12	Meja Podium	1	Buah		1
13	Meja Resepsionis	2	Buah		2
14	Meja 1/2 Biro	19	Buah		19
15	Kursi Rapat	50	Buah		50
16	Kursi tamu	2	Buah		2
17	Kursi Putar	11	Buah	2	9
18	Kursi Biasa	11	Buah	4	7
19	Kursi Lipat	29	Buah	29	0
20	Sofa	5	Buah	1	4
21	Karpet	1	Buah		1
22	Vacum Cleaner	2	Buah		2

NO	JENIS BARANG/GEDUNG	JUMLAH/LUAS	SATUAN	KONDISI	
				KURANG BAIK/RUSAK	BAIK
23	Lemari Es	2	Buah		2
24	AC	19	Buah	1	18
25	Kipas Angin	6	Buah	4	2
26	TV	3	Buah		3
27	Sound System	4	Buah	1	3
28	Camera	1	Buah		1
29	Handy Cam	2	Buah		2
30	Korden	3	Buah		3
31	Braket	1	Buah		1
32	Pemadam	10	Buah		10
33	Meja Kerja Eselon 3	2	Buah		2
34	Meja Pejabat lainnya	3	Buah		3
35	Kursi Pejabat Eselon 2	2	Buah	1	1
36	Kursi Pejabat Eselon 3	5	Buah		5
37	Kursi Pejabat Eselon 4	12	Buah		12
38	Kursi Pejabat lainnya	1	Buah		1
39	Micropon	1	Buah		1
40	Camera Elektronik	2	Buah		2
41	Layar Film/Proyektor	9	Buah	1	8
42	Facsimile	1	Buah		1
43	CCTV	1	Unit		1
44	Minicomputer	1	Buah		1
45	PC Unit	4	Unit		4
46	Laptop	25	Buah		25
47	Notebook	5	Buah		5
48	Printer	24	Buah	2	22
49	Server	1	Buah		1
50	Alat Absensi	2	Buah		2
51	Bangunan Gedung Kantor	6,864	M2		6,864
52	Bangunan Parkir Utara Gedung	71,5	M2		71,5
53	Bangunan Parkir Selatan Gedung	87,75	M2		87,75
54	Bangunan Air Bersih	6,25	M2		6,25
55	Instalansi gardu listrik	Tegangan Rendah			
56	Jaringan Distribusi Tegangan Listrik	1 s/d 20	KVA		

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2023

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Capaian kinerja 2 (sasaran) sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah diukur dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP dengan target 71,60 dan terealisasi 75,28 dengan capaian 105%. Sedangkan, untuk Sasaran strategis 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Desa dengan target 83,65; realisasi tahun 2022 sebesar 83,95 dengan capaian 100,35%.
2. Indeks Pelayanan Publik Desa dengan target 2,86; realisasi tahun 2022 sebesar 2,94 dengan capaian 102,79%.
3. Prosentase desa yang meningkat status Pembangunannya dengan target 50%; realisasi tahun 2022 sebesar 50% dengan capaian 100%.
4. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) dengan target 25,01; realisasi tahun 2022 sebesar 25,064 dengan capaian 100,215%.
5. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif target 60%; realisasi tahun 2022 sebesar 60% dengan capaian 60%.
6. Prosentase Lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes dengan target 90%; realisasi tahun 2022 sebesar 84% dengan capaian 93,33%.

Tabel TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur (2018-2023)

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	52.99	55	n/a	n/a	n/a	52.99	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
2	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	3 desa	6 desa	16 desa	23 desa	50 desa	6 desa	14 desa	23 desa	47 desa	n/a	200%	233%	127.77%	235%	n/a	
3	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	-	70	71	71,40	71,60	77	71	71.30	71.59	75.28	n/a	101.4%	100.42%	100.27%	105.13%	n/a	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	-	-	-	n/a	n/a	78,78	83.65	83.95	n/a	n/a	83.63	83.95	n/a	n/a	n/a	106.16%	100.35%	n/a	
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Desa	-	-	-	n/a	n/a	2,55	2.86	2.94	n/a	n/a	2.86	2.94	n/a	n/a	n/a	112.16%	102.79%	n/a	
6	% Desa yang meningkat status pembangunannya	-	-	-	n/a	n/a	30%	50%	100%	n/a	n/a	30%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
7	Indeks perkembangan Kawasan perdesaan (IPKP)	-	-	-	n/a	n/a	12.094	25.01	25,86	n/a	n/a	13.11	25.064	n/a	n/a	n/a	108.40%	100.215%	n/a	
8	% Lembaga kemasyarakatan dan	-	-	-	n/a	n/a	50%	60%	70%	n/a	n/a	50%	60%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Lembaga adat yang aktif																			
9	% Lembaga ekonomi desa (BUMdes) yang berkontribusi pada PADes	-	-	-	n/a	n/a	73%	90%	95%	n/a	n/a	73%	84%	n/a	n/a	n/a	100%	93.33%	n/a	
10	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
11	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
12	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	n/a	n/a	10 dok	10 dok	10 dok	n/a	n/a	10 dok	10 dok	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	yang tersusun																			
13	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	-	-	-	n/a	n/a	4 lap	4 lap	4 lap	n/a	n/a	4 lap	4 lap	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
14	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
15	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
16	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	-	-	-	n/a	n/a	17 dok	17 dok	17 dok	n/a	n/a	17 dok	17 dok	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
17	Jumlah pembayaran gaji dan	-	-	-	n/a	n/a	14 bl	14 bl	14 bl	n/a	n/a	14 bl	14 bl	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	tunjangan ASN lingkup DPMD yang difasilitasi																			
18	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	n/a	n/a	4 kl	4 kl	4 kl	n/a	n/a	4 kl	4 kl	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
19	Jumlah asn penerima pakaian dinas Kheki	-	-	-	n/a	n/a	n/a	33 stel	n/a	n/a	n/a	33 stel	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
20	<b>Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran</b>	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
21	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	-	-	-	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	kantor yang terfasilitasi																			
22	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang terfasilitasi	-	-	-	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
23	Jumlah peralatan rumah tangga yang terfasilitasi	-	-	-	n/a	n/a	5pkt	5pkt	7pkt	n/a	n/a	5pkt	5pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
24	Jumlah Pemenuhan barang cetak	-	-	-	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
25	Jumlah Pemenuhan barang penggandaan	-	-	-	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
26	Jumlah Pemenuhan	-	-	-	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Bahan Bacaan																			
27	Jumlah Penyediaan fasilitas kunjungan Tamu yang terfasilitasi	-	-	-	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	1 pkt	1 pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
28	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	n/a	n/a	30pkt	10pkt	60pkt	n/a	n/a	30pkt	10pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
29	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
30	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	n/a	n/a	1pkt	1pkt	1pkt	n/a	n/a	1pkt	1pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
31	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber	-	-	-	n/a	n/a	3pkt	3pkt	3pkt	n/a	n/a	3pkt	3pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	daya air dan listrik yang terfasilitasi																			
32	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	-	-	-	n/a	n/a	2pkt	2pkt	2pkt	n/a	n/a	2pkt	2pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
33	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	-	-	-	n/a	n/a	5pkt	2pkt	7pkt	n/a	n/a	5pkt	2pkt	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
34	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
35	Jumlah Pengadaan Meubel perangkat daerah	-	-	-	n/a	n/a	n/a	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
36	Jumlah pengadaan Lemari arsip	-	-	-	n/a	n/a	n/a	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
37	Jumlah pengadaan speaker	-	-	-	n/a	n/a	n/a	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
38	Jumlah pengadaan hardisk server	-	-	-	n/a	n/a	n/a	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
39	Jumlah Pengadaan Laptop	-	-	-	n/a	n/a	n/a	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
40	Jumlah Pengadaan Printer	-	-	-	n/a	n/a	n/a	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	
41	<b>Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
42	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	-	-	n/a	n/a	1unit	1unit	1unit	n/a	n/a	1unit	1unit	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
43	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	-	-	-	n/a	n/a	1unit	1unit	1unit	n/a	n/a	1unit	1unit	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
44	Jumlah kendaraan	-	-	-	n/a	n/a	14 unit	14 unit	14 unit	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	<i>dinas operasional atau lapangan yang dipelihara</i>																			
45	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya</i>	-	-	-	n/a	n/a	14 unit	14 unit	14 unit	n/a	n/a	1unit	1unit	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
46	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD yang dipelihara</i>	-	-	-	n/a	n/a	0 unit	20 unit	30 unit	n/a	n/a	1unit	1unit	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
47	Persentase desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	-	-	-	n/a	n/a	30%	50%	100%	n/a	n/a	30%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
48	Prosentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
49	Persentase desa yang	-	-	-	n/a	n/a	30%	50%	100%	n/a	n/a	30%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	mengajukan Raperdes kewenangan desa																			
50	Persentase desa yang dievaluasi perkembangan statusnya	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
51	Persentase desa yang mengajukan perkembangan status desanya	-	-	-	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	
52	Jumlah desa yang dibangun tentang tata wilayah desa	-	-	-	n/a	n/a	21 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	21 desa	n/a	n/a	n/a	n/a	21 desa	n/a	n/a	
53	Persentase desa yang dibangun tentang Kewenangan desa	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
54	Persentase desa yang difasilitasi Sarana dan Prasarannya	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
55	Persentase Desa yang melaporkan	-	-	-	n/a	n/a	80%	90%	90%	n/a	n/a	80%	90%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	LPPDes tepat waktu																			
56	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	-	-	-	n/a	n/a	90%	95%	100%	n/a	n/a	90%	95%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
57	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	-	-	-	n/a	n/a	90%	95%	100%	n/a	n/a	90%	95%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
58	Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	-	-	-	n/a	n/a	25%	50%	100%	n/a	n/a	25%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
59	Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
60	persentase desa yang melaporkan LPPDes	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TAR GET SPM	TAR GET IKK	TARGE T INDIKA TOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					201 9	202 0	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
61	persentase Desa yang melaporkan Pertanggung gjawaban realisasi APBDes	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
62	persentase penetapan pengisian jabatan aparatur pemerintah desa	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
63	Prosentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
64	Prosentase desa yang telah menyusun produk hukum	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
65	Jumlah desa yang diberikan pembinaan penyusunan produk hukum desa	-	-	-	n/a	n/a	302 desa	302 desa	302 desa	n/a	n/a	302 desa	302 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
66	% desa yang menyusun	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	dokumen perencanaan pembangunan desa																			
67	Persentase desa yang dibina tentang pengelolaan keuangan desa	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
68	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	-	-	-	n/a	n/a	25%	50%	100%	n/a	n/a	25%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
69	Persentase Desa yang menyelenggarakan Musyawarah Desa	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	0	n/a	n/a	100%	100%	0	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
70	Jumlah Desa yang perdesnya di evaluasi	-	-	-	n/a	n/a	302 desa	0	0	n/a	n/a	302 desa	0	0	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	
71	Persentase Desa yang menyelenggarakan PILKADES	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
72	Persentase pengisian jabatan	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	perangkat desa																			
73	Jumlah desa yang dibina penyusunan profil desa	-	-	-	n/a	n/a	302 desa	0	0	n/a	n/a	302 desa	0	0	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	
74	Jumlah desa dibina manajemen pemerintahan desa	-	-	-	n/a	n/a	302 desa	302 desa	302 desa	n/a	n/a	302 desa	302 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
75	Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa	-	-	-	n/a	n/a	25%	50%	100%	n/a	n/a	25%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
76	Persentase desa yang BPDnya dibina	-	-	-	n/a	n/a	25%	50%	100%	n/a	n/a	25%	50%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
77	Jumlah desa yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	n/a	n/a	0	13 desa	16 desa	n/a	n/a	0	13 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
78	Persentase desa yang menyusun LPPDes	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
79	Jumlah desa yang melaksanakan	-	-	-	n/a	n/a	302 desa	0	0	n/a	n/a	302 desa	0	0	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	penugasan urusan /kewenangan kabupaten																			
80	Jumlah Desa yang dievaluasi perkembangannya	-	-	-	n/a	n/a	302 desa	302 desa	302 desa	n/a	n/a	302 desa	302 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
81	Jumlah pemenang lomba desa	-	-	-	n/a	n/a	3 desa	3 desa	3 desa	n/a	n/a	3 desa	3 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
82	Persentase kerjasama antar desa yang aktif	-	-	-	n/a	n/a	33%	66%	100%	n/a	n/a	33%	66%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
83	Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	-	-	-	n/a	n/a	50%	67%	85%	n/a	n/a	50%	67%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
84	Persentase kawasan perdesaan yang aktif	-	-	-	n/a	n/a	23%	28,57%	28,57%	n/a	n/a	23%	28,57%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
85	Persentase kerjasama antar desa yang dibina	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
86	Persentase kerjasama desa dengan	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	pihak ketiga yang dibina																			
87	Persentase kawasan perdesaan yang dibina	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
88	Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa	-	-	-	n/a	n/a	59 desa	149 desa	214 desa	n/a	n/a	59 desa	149 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
89	Jumlah desa yang mengadakan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	-	-	-	n/a	n/a	10 desa	15 desa	20 desa	n/a	n/a	10 desa	15 desa	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
90	Jumlah kawasan Perdesaan	-	-	-	n/a	n/a	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	n/a	n/a	2 kawasan	2 kawasan	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
91	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	-	-	-	n/a	n/a	50%	60%	70%	n/a	n/a	50%	60%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
92	Persentase Desa yang lembaga ekonominya	-	-	-	n/a	n/a	16%	20%	25%	n/a	n/a	16%	20%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	(BUMDes) berkategori ya maju																			
93	Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	-	-	-	n/a	n/a	45%	80%	100%	n/a	n/a	45%	80%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
94	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat yang dibina	-	-	-	n/a	n/a	50%	60%	70%	n/a	n/a	50%	60%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
95	Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) yang status/kategori nya meningkat	-	-	-	n/a	n/a	10%	20%	30%	n/a	n/a	10%	20%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
96	Persentase desa pos pelayanan	-	-	-	n/a	n/a	5%	38%	80%	n/a	n/a	5%	38%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	Teknologi (posyantek) tingkat Kecamatan yang dibina																			
97	Jumlah desa yang mengkoordinasikan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	n/a	n/a	2 desa	0	0	n/a	n/a	2 desa	0	0	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	
98	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dikoordinasikan	-	-	-	n/a	n/a	20%	0	0	n/a	n/a	20%	0	0	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	
99	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	n/a	n/a	50%	50%	50%	n/a	n/a	50%	50%	0	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
100	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi sarana prasarannya	-	-	-	n/a	n/a	10%	0	0	n/a	n/a	10%	0	0	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
101	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang dibangun	-	-	-	n/a	n/a	30 BUMDes	35 BUMDes	30 BUMDes	n/a	n/a	30 BUMDes	35 BUMDes	0	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
102	Jumlah Posyantek yang terbentuk	-	-	-	n/a	n/a	1 posyantek	7 posyantek	13 posyantek	n/a	n/a	1 posyantek	7 posyantek	0	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
103	Persentase desa yang berpartisipasi dalam BBGRM	-	-	-	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	
104	Jumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan TMMD	-	-	-	n/a	n/a	1 desa	0	1 desa	n/a	n/a	1 desa	0	n/a	n/a	n/a	100%	0	n/a	
105	% TP PKK Desa yang dikoordinasikan	-	-	-	n/a	n/a	75%	0	0	n/a	n/a	75%	0	n/a	n/a	n/a	100%	0	n/a	

Tabel TC.23 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur (2018-2023)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.369.162.000,00	868.599.770,00	n/a	n/a	n/a	1.272.968.306,00	797.111.453,00	n/a	n/a	n/a	92.97%	91.77%	n/a	n/a	n/a	
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.369.162.000,00	868.599.770,00	n/a	n/a	n/a	1.272.968.306,00	797.111.453,00	n/a	n/a	n/a	92.97%	91.77%	n/a	n/a	n/a	
3	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.083.508.750,00	446.400.000,00	n/a	n/a	n/a	1.033.636.795,00	442.128.500,00	n/a	n/a	n/a	95.40%	99.04%	n/a	n/a	n/a	
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	584.558.750,00	n/a	n/a	n/a	n/a	540.726.795,00	n/a	n/a	n/a	n/a	92.50%	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	30.200.000,00	n/a	n/a	n/a	34.912.000,00	29.769.500,00	n/a	n/a	n/a	99.75%	98.57%	n/a	n/a	n/a	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.950.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	40.950.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	n/a	344.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	340.659.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.03%	n/a	n/a	n/a	
8	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan pendukungnya	407.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	401.448.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	98.64%	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana Gedung kantor	n/a	72.200.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	71.700.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	99.31%	n/a	n/a	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
10	Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	16.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	15.600.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	97.50%	n/a	n/a	n/a	n/a	
11	<b>Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD</b>	68.065.500,00	60.399.500,00	n/a	n/a	n/a	67.876.000,00	60.244.750,00	n/a	n/a	n/a	99.72%	99.74%	n/a	n/a	n/a	
12	Penyusunan rencana kerja SKPD	22.450.000,00	26.639.750,00	n/a	n/a	n/a	22.366.000,00	26.500.000,00	n/a	n/a	n/a	99.63%	99.48%	n/a	n/a	n/a	
13	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	38.115.500,00	22.580.000,00	n/a	n/a	n/a	38.025.000,00	22.565.000,00	n/a	n/a	n/a	99.76%	99.93%	n/a	n/a	n/a	
14	Penyusunan laporan keuangan SKPD	7.500.000,00	11.179.750,00	n/a	n/a	n/a	7.485.000,00	11.179.750,00	n/a	n/a	n/a	99.80%	100.0%	n/a	n/a	n/a	
15	<b>Program Bina Pemerintahan Desa</b>	1.197.375.750,00	1.127.700.800,00	n/a	n/a	n/a	1.138.579.650,00	657.364.735,00	n/a	n/a	n/a	95.09%	58.29%	n/a	n/a	n/a	
16	Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	225.489.750,00	n/a	n/a	n/a	n/a	214.916.650,00	n/a	n/a	n/a	n/a	95.31%	n/a	n/a	n/a	n/a	
17	Fasilitasi pengisian aparatur pemerintahan desa	691.076.000,00	782.081.400,00	n/a	n/a	n/a	674.141.000,00	390.044.435,00	n/a	n/a	n/a	97.55%	49.87%	n/a	n/a	n/a	
18	Pembinaan penyusunan produk hukum desa	37.449.500,00	36.687.500,00	n/a	n/a	n/a	30.565.000,00	31.112.500,00	n/a	n/a	n/a	81.62%	84.80%	n/a	n/a	n/a	
19	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	243.360.500,00	308.931.900,00	n/a	n/a	n/a	218.957.000,00	236.207.800,00	n/a	n/a	n/a	89.97%	76.46%	n/a	n/a	n/a	
20	<b>Program Pembangunan Desa</b>	353.101.500,00	250.019.950,00	n/a	n/a	n/a	308.677.500,00	240.134.750,00	n/a	n/a	n/a	87.42%	96.05%	n/a	n/a	n/a	
21	Fasilitasi perencanaan pembangunan desa	118.807.000,00	125.932.350,00	n/a	n/a	n/a	96.762.000,00	119.587.250,00	n/a	n/a	n/a	81.44%	94.96%	n/a	n/a	n/a	
22	Pembinaan pengelolaan pembangunan desa	234.294.500,00	124.087.600,00	n/a	n/a	n/a	211.915.500,00	120.547.500,00	n/a	n/a	n/a	90.45%	97.15%	n/a	n/a	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
23	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	355.941.000,00	408.701.200,00	n/a	n/a	n/a	321.861.750,00	404.441.700,00	n/a	n/a	n/a	90.43%	98.96%	n/a	n/a	n/a	
24	Fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi desa	222.408.500,00	394.531.200,00	n/a	n/a	n/a	193.151.000,00	390.321.700,00	n/a	n/a	n/a	86.85%	98.93%	n/a	n/a	n/a	
25	Pengembangan kawasan perdesaan	58.532.500,00	14.170.000,00	n/a	n/a	n/a	53.710.750,00	14.120.000,00	n/a	n/a	n/a	91.76%	99.65%	n/a	n/a	n/a	
26	Pendampingan program jalin mitra	75.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	75.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	100,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	
27	<b>Program Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat</b>	566.988.500,00	267.618.600,00	n/a	n/a	n/a	541.752.750,00	263.429.600,00	n/a	n/a	n/a	95.55%	98.43%	n/a	n/a	n/a	
28	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif	271.450.000,00	200.260.000,00	n/a	n/a	n/a	253.341.250,00	196.171.000,00	n/a	n/a	n/a	93.33%	97.96%	n/a	n/a	n/a	
29	Penguatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	145.538.500,00	67.358.600,00	n/a	n/a	n/a	142.011.500,00	67.258.600,00	n/a	n/a	n/a	97.58%	99.85%	n/a	n/a	n/a	
30	Pemberdayaan masyarakat mendukung TNI Manunggal dalam membangun desa	150.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	146.400.000,00	n/a	;	n/a	n/a	97.60%	n/a	n/a	n/a	n/a	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	n/a	6.089.571.455	6.193.913.591,00	5.875.880.168	n/a	n/a	5.042.288.588	5.676.458.212,00	n/a	n/a	n/a	82%	91.65%	n/a	
2	<b>Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	56.023.000,00	14.276.976,00	16.200.000	n/a	n/a	56.010.500,00	14.177.900,00	n/a	n/a	n/a	99.97%	99.31%	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	n/a	n/a	27.023.000	2.672.976,00	4.500.000	n/a	n/a	27.023.000	2.672.900,00	n/a	n/a	n/a	100%	100.00%	n/a	
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	n/a	n/a	29.000.000,00	11.604.000,00	11.700.000	n/a	n/a	28.987.500,00	11.505.000,00	n/a	n/a	n/a	99.96%	99.15%	n/a	
5	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	4.881.614.685,00	5.150.267.550,00	5.021.588.288	n/a	n/a	3.934.126.081,00	4.669.633.435,00	n/a	n/a	n/a	80.59%	90.67%	n/a	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	4.881.614.685	4.996.661.550,00	4.849.826.288	n/a	n/a	3.918.952.081	4.517.827.435,00	n/a	n/a	n/a	80,27%	90.42%	n/a	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	15.179.000	153.606.000,00	171.762.000	n/a	n/a	15.174.000	151.806.000,00	n/a	n/a	n/a	99,6%	98.83%	n/a	
8	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>	n/a	n/a	7.500.000,00	n/a	-	n/a	n/a	7.470.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	99,6%	n/a	n/a	
9	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	n/a	n/a	7.500.000	n/a	-	n/a	n/a	7.470.000	n/a	n/a	n/a	n/a	99,6%	n/a	n/a	
10	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	n/a	n/a	9.952.250,00	9.900.000,00	7.350.000	n/a	n/a	9.597.250,00	9.900.000,00	n/a	n/a	n/a	96.43%	100.00%	n/a	
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n/a	n/a	9.952.250	9.900.000,00	7.350.000	n/a	n/a	9.597.250	-	n/a	n/a	n/a	99,43%	-	n/a	
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	n/a	n/a	-	9.900.000,00	-	n/a	n/a	-	9.900.000,00	n/a	n/a	n/a		100.00%	n/a	
13	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	n/a	n/a	270.404.020,00	182.407.090,00	152.103.880	n/a	n/a	253.395.637,00	179.087.804,00	n/a	n/a	n/a	93.71%	98.18%	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	n/a	n/a	13.031.620	13.543.840,00	13.543.880	n/a	n/a	12.999.700	13.542.500,00	n/a	n/a	n/a	99,75%	99,99%	n/a	
15	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	n/a	n/a	41.725.300	32.486.500,00	45.318.000	n/a	n/a	41.724.900	32.485.200,00	n/a	n/a	n/a	99,99%	100,00%	n/a	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a	n/a	44.700.100	48.629.950,00	46.603.000	n/a	n/a	44.625.600	47.177.400,00	n/a	n/a	n/a	99,83	97,01%	n/a	
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	n/a	n/a	13.500.000	5.853.800,00	7.046.000	n/a	n/a	8.485.500	5.837.700,00	n/a	n/a	n/a	62,85	99,72%	n/a	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	n/a	n/a	4.704.000	4.704.000,00	3.720.000	n/a	n/a	3.702.000	2.860.000,00	n/a	n/a	n/a	78,69	60,80%	n/a	
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	n/a	n/a	56.593.000	77.189.000,00	35.873.000	n/a	n/a	8.079.800	77.185.004,00	n/a	n/a	n/a	53.704.137	99,99%	n/a	
20	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	n/a	n/a	544.184.500,00	464.400.000,00	497.100.000	n/a	n/a	493.136.622,00	443.551.898,00	n/a	n/a	n/a	90,62%	95,51%	n/a	
21	Penyediaan jasa surat menyurat	n/a	n/a	1.800.000	500.000,00	0	n/a	n/a	950.000,-	500.000,00	n/a	n/a	n/a	52,77%	100,00%	n/a	
22	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	n/a	n/a	86.432.500	99.000.000,00	101.500.000	n/a	n/a	66.516.575	86.832.445,00	n/a	n/a	n/a	76,95	87,71%	n/a	
23	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	n/a	n/a	210.502.000	225.500.000,00	215.000.000	n/a	n/a	192.252.000	221.263.468,00	n/a	n/a	n/a	91,33	98,12%	n/a	
24	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	n/a	n/a	245.450.000	139.400.000,00	180.600.000	n/a	n/a	233.418.047	134.955.985,00	n/a	n/a	n/a	95,09%	96,81%	n/a	
25	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	n/a	n/a	75.374.000,00	175.236.675,00	0	n/a	n/a	75.156.087,00	166.294.000,00	n/a	n/a	n/a	99,71%	94,90%	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																
26	Pengadaan Meubel	n/a	n/a	n/a	15.550.000,00	0	n/a	n/a	n/a	14.900.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	95,82%	n/a	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	n/a	n/a	40.374.000	109.686.675,00	0	n/a	n/a	40.309.000	105.018.000,00	n/a	n/a	n/a	99,83%	95,74%	n/a	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	35.000.000	50.000.000,00	0	n/a	n/a	34.874.087	46.376.000,00	n/a	n/a	n/a	99,64%	92,75%	n/a	
29	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	n/a	n/a	244.518.000,00	197.425.300,00	181.538.000	n/a	n/a	213.395.703,00	193.81.175,00	n/a	n/a	n/a	87,27%	98,17%	n/a	
30	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	n/a	n/a	62.200.000	71.710.000,00	68.380.000	n/a	n/a	54.559.095	69.959.430,00	n/a	n/a	n/a	87%	97,56%	n/a	
31	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	n/a	n/a	94.478.000	106.795.300,00	89.908.000	n/a	n/a	71.192.930	105.018.745,00	n/a	n/a	n/a	75%	98,34%	n/a	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a	n/a	33.740.000	18.920.000,00	23.250.000	n/a	n/a	33.656.678	18.835.000,00	n/a	n/a	n/a	99%	99,55%	n/a	
33	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	n/a	n/a	157.124.250	188.534.800,00	70.687.450	n/a	n/a	138.005.750,00	178.088.750,00	n/a	n/a	n/a	87,83%	94,46%	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
34	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	n/a	n/a	157.124.250	188.534.800,00	70.687.450	n/a	n/a	138.005.750,00	178.088.750,00	n/a	n/a	n/a	87.83%	94.46%	n/a	
35	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	n/a	n/a	30.374.500	-	-	n/a	n/a	18.476.000	-	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	
36	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	n/a	n/a	20.835.000	-	-	n/a	n/a	14.135.000	-	n/a	n/a	n/a	-	n/a		
37	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	n/a	n/a	22.787.000	10.359.900,00	10.359.800	n/a	n/a	-	7.841.900,00	n/a	n/a	n/a	-	75.69%	n/a	
38	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	n/a	n/a	0	-	-	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	
39	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	n/a	n/a	83.127.750	178.174.900,00	60.327.650	n/a	n/a	82.607.750	170.246.850,00	n/a	n/a	n/a	99%	95.55%	n/a	
40	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	n/a	n/a	616.305.650,00	2.439.570.900,00	738.710.350	n/a	n/a	507.022.829,00	2.363.992.045,00	n/a	n/a	n/a	82.27%	96.90%	n/a	
41	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	n/a	n/a	616.305.650,00	2.439.570.900,00	738.710.350	n/a	n/a	507.022.829,00	2.363.992.045,00	n/a	n/a	n/a	82.27%	96.90%	n/a	
42	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	n/a	n/a	20.580.000	7.669.900,00	7.599.700	n/a	n/a	13.608.000	4.640.000,00	n/a	n/a	n/a	66,47%	60.50%	n/a	
43	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	n/a	n/a	110.500.000	428.022.400,00	169.242.200	n/a	n/a	94.775.000	419.564.400,00	n/a	n/a	n/a	85,76	98.02%	n/a	
44	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	n/a	n/a	132.877.000	941.376.400,00	25.000.000	n/a	n/a	60.751.500	933.322.400,00	n/a	n/a	n/a	45,72	99.14%	n/a	
45	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	n/a	n/a	82.758.400	143.945.900,00	29.000.000	n/a	n/a	65.073.879	141.127.800,00	n/a	n/a	n/a	78,63%	98.04%	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
46	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	n/a	n/a	11.650.000	21.201.700,00	-	n/a	n/a	10.225.000	15.704.000,00	n/a	n/a	n/a	87,76%	74,07%	n/a	
47	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	n/a	n/a	33.650.000	195.699.700,00	7.404.450	n/a	n/a	23.455.500	174.476.145,00	n/a	n/a	n/a	89,16%	10,06%	n/a	
48	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	n/a	n/a	21.700.000	5.554.600,00	5.000.000	n/a	n/a	17.400.000	5.180.000,00	n/a	n/a	n/a	80,18%	93,26%	n/a	
49	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	n/a	n/a	37.375.000	11.000.000,00	5.000.000	n/a	n/a	24.530.000	9.707.300,00	n/a	n/a	n/a	65,63%	88,25%	n/a	
50	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	n/a	n/a	36.538.000	63.927.000,00	25.000.000	n/a	n/a	35.667.500	61.214.500,00	n/a	n/a	n/a	97,61	95,76%	n/a	
51	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	n/a	n/a	9.300.000	116.189.900,00	203.964.000	n/a	n/a	3.135.000	106.770.000,00	n/a	n/a	n/a	33,70	91,89%	n/a	
52	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	n/a	n/a	0	439.149.500,00	210.000.000	n/a	n/a	-	438.436.000,00	n/a	n/a	n/a	-	99,84%	n/a	
53	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	n/a	n/a	13.570.000	25.636.100,00	15.000.000	n/a	n/a	1.187.500	16.517.500,00	n/a	n/a	n/a	87,50	64,43%	n/a	
54	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	n/a	n/a	43.610.000	40.197.800,00	36.500.000	n/a	n/a	41.597.500	37.331.500,00	n/a	n/a	n/a	95,38%	92,87%	n/a	
55	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	n/a	n/a	122.365.000,00	31.977.000,00	19.200.000	n/a	n/a	104.481.000,00	30.003.500,00	n/a	n/a	n/a	85,38%	93,83%	n/a	
56	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	n/a	n/a	122.365.000,00	31.977.000,00	19.200.000	n/a	n/a	104.481.000,00	30.003.500,00	n/a	n/a	n/a	85,38%	93,83%	n/a	
57	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	n/a	n/a	43.963.000	18.800.000,00	4.023.000	n/a	n/a	40.984.000	18.556.500,00	n/a	n/a	n/a	93,22%	98,70%	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
58	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	n/a	n/a	54.434.000	5.014.000,00	10.014.000	n/a	n/a	49.484.000	3.962.000,00	n/a	n/a	n/a	90,90%	79,02%	n/a	
59	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	n/a	n/a	23.968.000	8.163.000,00	5.163.000	n/a	n/a	14.013.000	7.485.000,00	n/a	n/a	n/a	58,46	91,69%	n/a	
60	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	n/a	n/a	1.606.446.050	407.835.600,00	635.196.350	n/a	n/a	1.372.808.610,00	382.856.400,00	n/a	n/a	n/a	85,46%	93,88%	n/a	
61	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	n/a	n/a	1.606.446.050,00	407.835.600,00	635.196.350	n/a	n/a	1.372.808.610,00	382.856.400,00	n/a	n/a	n/a	85,46%	93,88%	n/a	
62	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	n/a	n/a	1.525.000	-	-	n/a	n/a	1.525.000	-	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
63	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n/a	n/a	3.190.000	-	-	n/a	n/a	2.788.000	-	n/a	n/a	n/a	87,39%	-	n/a	
64	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n/a	n/a	252.615.500	114.708.600,0	95.000.000	n/a	n/a	239.408.750	113.971.600,0	n/a	n/a	n/a	99,36%	45,20%	n/a	
65	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n/a	n/a	100.000	-	-	n/a	n/a	100.0001	-	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE -					REALISASI TAHUN KE -					CAPAIAN TAHUN KE -					KET
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
66	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	n/a	n/a	107.717.500	175.619.800,00		n/a	n/a	94.329.050	160.069.800,00	n/a	n/a	n/a	93,33%	91.15%	n/a	
67	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	n/a	n/a	4.500.000	26.401.800,00	26.040.700	n/a	n/a	4.200.000	26.270.000,00	n/a	n/a	n/a	93,33	99.50%	n/a	
68	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	n/a	n/a	34.005.000	91.105.400,00	10.999.750	n/a	n/a	4.824.000	82.545.000,00	n/a	n/a	n/a	4,09%	90.60%	n/a	
69	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	n/a	n/a	.178.134.250	-	-	n/a	n/a	175.759.250	-	n/a	n/a	n/a	98,66%	-	n/a	
70	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	n/a	n/a	24.658.800	-	-	n/a	n/a	23.358.800	-	n/a	n/a	n/a	94,72%	-	n/a	

## 2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memberikan Pelayanan kepada Desa dan Kecamatan dengan berbagai jenis produk layanan sebagai berikut :

- Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Fasilitasi Prodeskel dan Epdeskel
- Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga
- Fasilitasi Penyaluran Dana Desa
- Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa
- Fasilitasi Bantuan Keuangan Sarpras Desa
- Fasilitasi Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemdes
- Layanan Pengaduan

a. Pada kegiatan tertentu Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang bermitra dengan:

1. Perguruan Tinggi (UNESA), Badan Regional II BKN Surabaya dan BKD Propinsi Jawa Timur pelaksanaan CAT bagi perangkat desa dalam rangka pengisian kekosongan perangkat desa.
2. Perguruan Tinggi STIE Dewantara Kabupaten Jombang dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa dengan nama BUMDes School (Sekolah BUMDes).
3. TOP DAM KODAM 5 BRAWIJAYA dalam rangka penegasan dan penetapan batas desa di wilayah Kabupaten Jombang.
4. BPKP dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.
5. Desa, Kecamatan dan OPD terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

b. Dukungan Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah Bank Jombang terkait Penyaluran Bantuan Keuangan.

- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang adalah CAT (*Computer Assisted Test*) bagi perangkat desa, Pengelolaan Keuangan Desa.



# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG**

**3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Masih rendahnya keberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Jombang, hal tersebut dapat terlihat dari Peran Lembaga ekonomi di desa yang optimal dalam meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian di desa; Dalam proses pelaksanaan pembangunan peran lembaga kemasyarakatan desa juga belum dirasakan oleh masyarakat/belum optimal; Terkait penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yaitu pengelolaan keuangan desa, inventarisasi asset desa, dokumen perencanaan di desa serta dokumen-dokumen lain di desa masih jauh dari baik yang berarti masih diperlukan adanya pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terkait hal tersebut; Keterlibatan generasi muda di desa belum sepenuhnya ikut serta dalam membangun dan memajukan desanya.

### **3.2 ISU STRATEGIS**

Dari permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Peran lembaga ekonomi di desa belum optimal.
2. Keberadaan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa masih kurang dalam proses pembangunan.
3. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa masih kurang optimal.
4. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya di desa.
5. Kurangnya sarpras untuk penunjang pelaksanaan kerja dan sarpras kearsipan
6. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.



# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis perangkat daerah yang dihadapi. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang adalah “Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dan Meningkatkan Keberdayaan Desa”. Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 2. Meningkatnya Status Desa. Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang digambarkan dengan table T-C.25.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”, yaitu *Specific* (khusus), *Measureable* (terukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu). Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas:

- *Specific* (khusus): Tujuan dari sasaran Meningkatnya status Desa yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan “Persentase desa yang meningkat statusnya”.
- *Measureable* (terukur): Keberhasilan dapat diukur dengan “Persentase desa yang meningkat statusnya”.
- *Attainable* (dapat dicapai): sasaran akan dapat dicapai dengan kapasitas dan sumberdaya yang sudah tersedia.
- *Realistic* (nyata): “Persentase desa yang meningkat statusnya” dapat di capai setelah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- *Time bound* (tepat waktu): Waktu pencapaian dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Tabel T-C.25  
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASE LINE (2022)	TARGET		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	Indeks	52.99	82.20	75	80.1
2	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	47	91	58	62
			Persentase desa yang meningkat statusnya	Prosentase	37%	47%	57%	65%

## 4.2 CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Tabel 4.2 CASCADING RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KAB. JOMBANG TAHUN 2024-2026

NAMA PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG  
 URUSAN YANG DIAMPU : 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 2. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

													<i>Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</i>		
													<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian</i>
													<i>Administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran</i>	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang di sediakan</i>
															<i>Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan</i>
															<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</i>
															<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>
															<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan</i>
															<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan</i>

													Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
															Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan
															Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
													Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang milik daerah dalam kondisi baik	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
															Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

												<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang</i>
4. Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya	Indeks Gini	Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatkan Keberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat statusnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IPP Desa	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Prosentase LPPDesa berkategori baik</i>	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>	<i>Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum desa</i>
									IKM Desa			<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa</i>
												<i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>	<i>Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>

													<i>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>
													<i>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>
													<i>Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa</i>
													<i>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa</i>
													<i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</i>	<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>
													<i>Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa</i>
													<i>Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa</i>
													<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>

								PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keselarasan RPJMDes, RKPDes, APBDes yang tersusun	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
								PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan status BUMDes/BUMDesma	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan BUMDes aktif	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
								PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	% desa yang melakukan kerjasama aktif	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	jumlah desa dengan kerjasama antar desanya	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
											jumlah desa dengan kerjasama dengan pihak ketiganya	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota
											jumlah desa yang kawasan perdesaannya dibina	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
								PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa

								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
												Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
												Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
												Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa



# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai institusi pemerintah daerah berada dalam lingkup (1) Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), (2) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Panduan bagi penyelenggaraan unit organisasi dibawah Kemendesa PDTT dan Kemendagri tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tidak lepas dari strategi dan arah kebijakan institusi di atasnya dengan menyesuaikan kondisi dan potensi wilayahnya.

- 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTRIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
- Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Apalagi akibat adanya pandemi Covid-19 ini untuk pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian Indonesia sumber pertumbuhannya dan motor penggerakannya adalah perdesaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan negara- negara lebih berorientasi untuk memperbaiki kondisi negaranya (*inward looking*) daripada untuk berinvestasi. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perdesaan ke depan menggunakan model pembangunan perdesaan *neo-endogen (neo-endogenous rural development model)*, yaitu pembangunan perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan subsidi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan pebisnis pemula (*start up business*) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus agenda-agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas

pembangunan desa, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaaktif.

Tujuan SDGs Desa merupakan tanggung jawab bersama lintas Kementerian/Lembaga, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya. Oleh karena itu diperlukan instrumen regulasi yang bisa melandasi dan mensinergikan peran dari masing-masing pihak dalam pembangunan desa.

Dalam rangka memudahkan pengukuran ketercapaian SDGs Desa akan ditetapkan indikator-indikator dan peta strategis sehingga *inline* dengan tujuan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra 2020-2024.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

ARAH	STRATEGI
Mengarutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa
	Menyiapkan data yang tepat, akurat dan <i>real time</i> berbasis warga dan desa
	Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa
	Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan	Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan
	Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar
	Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul	Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien
	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat

ARAH	STRATEGI
	Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan
	Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0
	Peningkatan peran <i>gender</i> dalam pembangunan perdesaan
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan
	Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor
	Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan
	Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian ( <i>agro-based industry</i> ), kepariwisataan serta ekonomi kreatif
	Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha
	Peningkatan <i>start-up business</i> perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial
	Fasilitasi pengembangan Desa Wisata
	Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital	Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan
	Integrasi data dan informasi perdesaan baik <i>numeric</i> maupun <i>spasial</i>
	Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi
	Pengembangan <i>e-commerce</i> , <i>e-logistic</i> dan <i>fintech</i> di perdesaan melalui Desa Digital
Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan	Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
	Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R ( <i>reuse, reduce, recycle</i> )
	Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan
	Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa
	Berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan

ARAH	STRATEGI
	Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program <i>food estate</i>
	Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Memfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan
	Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat
	Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
	Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat
	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa
Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.	Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh <i>stakeholders</i>
	Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
	Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi
	Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha
	Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatkan dukungan manajemen
	Meningkatkan pengembangan SDM aparatur
	Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi

## 5.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

VISI “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”.

MISI:

- Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

#### A. TUJUAN

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

#### B. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini meliputi, Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada dan pemilu, ormas.
- 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.
- 3) Meningkatnya kewaspadaan nasional.
- 4) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM.
- 5) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
- 6) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif

#### C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- 1) Peningkatan kualitas SDM.
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi.
- 3) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah.
- 4) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
- 5) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah.
- 6) Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

### 5.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan desa serta pemberdayaan masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG.
3. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
4. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, kemudian sasaran pembangunan beserta indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. dan pemberdayaan masyarakat miskin, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
  - a) Prosentase peningkatan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kelurahan yang aktif.
  - b) Prosentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha.
2. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
  - a) Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi.
  - b) Prosentase kelompok masyarakat yang menerapkan TTG di desa/kel.
  - c) Prosentase peningkatan jumlah komunikasi masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA.
3. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kel, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
  - a) Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif.
  - b) Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007).
4. Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
  - a) Prosentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
  - b) Prosentase Desa/Kel yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif.

#### 5.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sesungguhnya telah melibatkan amanat pembangunan kesetaraan gender dalam RPJPN 2005-2025 dimana dalam RPJM 4 (2020-2024) poin ke-2 adalah terwujudnya kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat

dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, difabel dan kelompok rentan lainnya.

Pembangunan kesetaraan gender di lingkungan pemerintah daerah adalah memberikan partisipasi kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan) secara adil dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Setiap perangkat daerah harus memiliki Anggaran Responsive Gender (ARG) yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja). Kegiatan yang memiliki ARG akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang telah menyusun ARG untuk setiap kegiatan sebagai program yang akan dijalankan baik yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) 2024-2026 dan rencana kerja (renja) setiap tahunnya. Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang diharapkan akan memberikan manfaat yang sama bagi orang-orang yang menjadi objek kegiatan baik laki-laki dan perempuan.

Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang 2024-2026

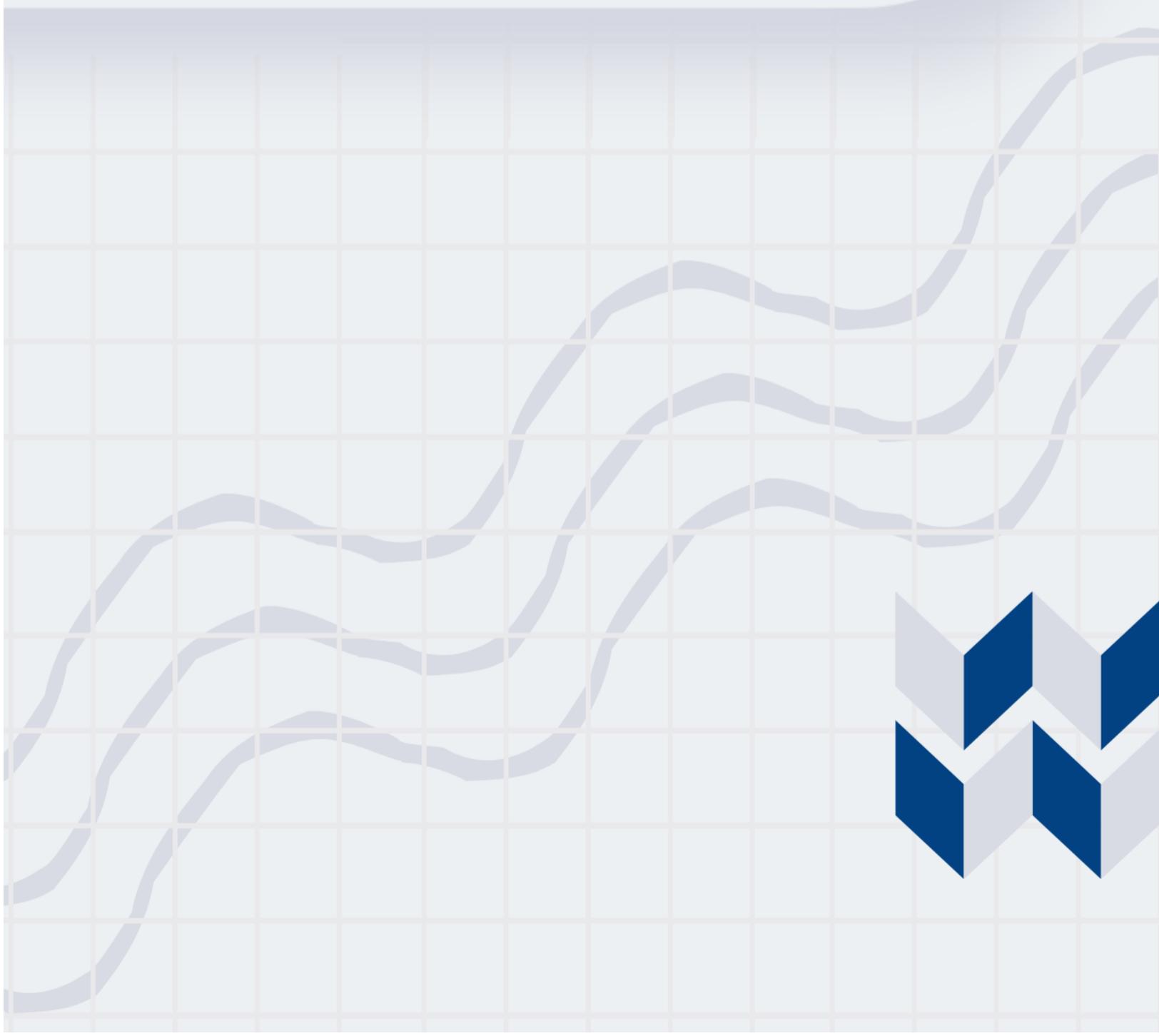
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan 1 Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Penguatan komitmen mulai dari eselon 2 sampai dengan jabatan fungsional umum	Semua ASN mulai dari eselon 2 sampai staf terlibat aktif dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal yang merupakan variabel utama di dalam implementasi sakup.
		Penerapan Anggaran berbasis kinerja	Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator terukur sehingga anggaran hanya untuk membiayai hasil ( <i>outcome oriented</i> )
		Pembinaan SAKIP	Memberikan pemahaman implementasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			SAKIP kepada seluruh ASN
Tujuan 2 Meningkatkan Keberdayaan Desa	Sasaran 2 Meningkatnya status desa	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan desa dalam bidang ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan	Peningkatan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desaberdasarkan hasil IDM
		Meningkatkan pembinaan dalam perencanaan dan pemenuhan sarana prasarana desa	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa



# BAB VI

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang untuk kurun waktu 2024-2026 sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemngunan Daerah. Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2026. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel T-C 27. Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perlu diketahui bahwa terdapat penyesuaian nama indikator subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah.

Tabel TC.27

## Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Pagu Indikatif Renstra 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (SIGMA OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun-1 2024 (000)		Tahun-2 2025 (000)		Tahun-3 2026 (000)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							TARGET	RP.000	TARGET	RP.000	TARGET	RP.000	TARGET	RP.000		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-18	-19	-20	-21
Meningkantnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	6,290,186	100%	6,290,186	100%	6,290,186	100%	6,290,186	DPMD	Kab.Jombang
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	100%	20,000	DPMD	Kab.Jombang

						Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	10,000	DPMD	Kab.Jombang						
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	10,000	DPMD	Kab.Jombang						
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	5,150,268	100%	5,150,268	100%	5,150,268	100%	5,150,268	DPMD	Kab.Jombang
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	n/a	33 orang	4,996,662	DPMD	Kab.Jombang						

							Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	n/a	4 dok	153,606	DPMD	Kab.Jombang						
							<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100%	100%	10,000	100%	10,000	100%	10,000	100%	10,000	DPMD	Kab.Jombang
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	n/a	6 dok	10,000	DPMD	Kab.Jombang						
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	30 paket	18.000	DPMD	Kab.Jombang						
							<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan pelayanan Adminis</b>	100%	100%	385,023	100%	385,023	100%	385,023	100%	385,023	DPMD	Kab.Jombang







						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	20 unit	106,785	20 unit	106,785	20 unit	106,785	20 unit	106,785	DPMD	Kab.Jombang
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	n/a	80 unit	35,000	80 unit	35,000	80 unit	35,000	80 unit	35,000	DPMD	Kab.Jombang
<b>Meningkatkan Keberdayaan Desa</b>	<b>Meningkatkan status desa</b>	<b>Persentase desa yang meningkat statusnya</b>				<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>IKM Desa</b>	<b>83.63</b>	<b>84.1</b>	<b>0.00</b>	<b>84.25</b>	<b>0.00</b>	<b>84.5</b>	<b>0.00</b>	<b>84.5</b>	<b>0.00</b>	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>
							<b>IPP Desa</b>	<b>2.86</b>	<b>2.94</b>	<b>1,140,000</b>	<b>2.96</b>	<b>1,565,000</b>	<b>3.04</b>	<b>1,390,000</b>	<b>3.04</b>	<b>1,390,000</b>	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>
							Prosentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	n/a	100%		100%		100%		100%		DPMD	Kab.Jombang
							Prosentase	n/a	20.50%		23.80%		27.10%		27.10%		DPMD	Kab.Jombang



						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	n/a	302 orang	140,000	302 orang	140,000	302 orang	140,000	302 orang	140,000	DPMD	Kab.Jombang
						Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	n/a	0	0	286 laporan	425,000	9 laporan	250,000	295 laporan	675,000	DPMD	Kab.Jombang
						Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	n/a	50 laporan	10,000	50 laporan	10,000	50 laporan	10,000	50 laporan	10,000	DPMD	Kab.Jombang
						Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	n/a	3 dok	25,000	3 dok	25,000	3 dok	25,000	3 dok	25,000	DPMD	Kab.Jombang
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	n/a	302 dok	50,000	302 dok	50,000	302 dok	50,000	302 dok	50,000	DPMD	Kab.Jombang





							Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	n/a	5 dok	30,000	DPMD	Kab.Jombang						
							Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	n/a	4 dok	30,000	DPMD	Kab.Jombang						
							Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	n/a	2 dok	30,000	DPMD	Kab.Jombang						
							<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Prosentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa</b>	n/a	76.43%	175,000	76.43%	175,000	76.43%	175,000	76.43%	175,000	DPMD	Kab.Jombang
							<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa</b>	n/a	302 desa	175,000	DPMD	Kab.Jombang						

						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	n/a	1175 unit	175,000	DPMD	Kab.Jombang						
						<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	n/a	100%	305,000	100%	305,000	100%	305,000	100%	305,000	DPMD	Kab.Jombang
						<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	n/a	302 desa	305,000	DPMD	Kab.Jombang						

							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n/a	7 lembaga	125,000	DPMD	Kab.Jombang						
							Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	n/a	1 laporan	30,000	DPMD	Kab.Jombang						
							Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	n/a	1 laporan	75,000	DPMD	Kab.Jombang						
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	n/a	1 dok	75,000	DPMD	Kab.Jombang						







						<b>Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah</b>	<b>Persent ase pemenu han administ rasi kepega waian perangk at daerah</b>	100%	100%	28.000	100%	28.000	100%	28.000	100%	28.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jomban g</b>
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokume n Pendata an dan Pengola han Administ rasi Kepegaw aian	n/a	6 dok	10.000	DPMD	Kab.Jombang						
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	n/a	30 paket	18.000	DPMD	Kab.Jombang						
						<b>Administra si Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persent ase pemenu han pelayan an administ rasi perkant oran</b>	100%	100%	385.023	100%	385.023	100%	385.023	100%	385.023	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jomban g</b>

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	13 paket	13.600	DPMD	Kab.Jombang						
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	21 paket	35.000	DPMD	Kab.Jombang						
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	16 paket	48.630	DPMD	Kab.Jombang						
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	15,230 paket	200.000	DPMD	Kab.Jombang						

						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	5 paket	5.900	DPMD	Kab.Jombang						
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	2 dok	4.704	DPMD	Kab.Jombang						
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	42 laporan	77.189	DPMD	Kab.Jombang						
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	n/a	4 Laporan	9.600	DPMD	Kab.Jombang						
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>Persentase pemenuh</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>511.400</b>	<b>100%</b>	<b>511.400</b>	<b>100%</b>	<b>511.400</b>	<b>100%</b>	<b>511.400</b>	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>

							<b>Urusan Pemerintah an Daerah</b>	<b>han penunja ng urusan pemerin tah daerah</b>											
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	n/a	36 laporan	115.800	DPMD	Kab.Jombang						
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	n/a	52 laporan	215.000	DPMD	Kab.Jombang						
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang	n/a	24 laporan	180.600	DPMD	Kab.Jombang						

							Disediakan												
							<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	100%	100%	213.495	100%	213.495	100%	213.495	100%	213.495	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	n/a	1 unit	71.710	DPMD	Kab.Jombang						
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	20 unit	106.785	DPMD	Kab.Jombang						

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	80 unit	35.000	DPMD	Kab.Jombang						
Meningkatkan Keberdayaan Desa	Meningkatkan status desa	Persentase desa yang meningkat statusnya				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IKM Desa	83,63	84.1	1.140.000	84,25	1.565.000	84,5	1.390.000	85	1.815.000	DPMD	Kab.Jombang
							IPP Desa	2,86	2,94		2,96		3,04		3,04		DPMD	Kab.Jombang
							Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	n/a	100%		100%		100%		100%		DPMD	Kab.Jombang
							Persentase	n/a	20,5%		23,80%		27,1%		27,1%		DPMD	Kab.Jombang



						Hukum Desa	Penyusunan Produk Hukum Desa													
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	n/a	42 dok	50.000	42 dok	50.000	42 dok	50.000	42 dok	50.000	DPMD	Kab.Jombang		
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	n/a	302 orang	140.000	302 orang	140.000	302 orang	140.000	302 orang	140.000	DPMD	Kab.Jombang		
						Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	n/a	0	0	286 laporan	425.000	9 laporan	250.000	295 laporan	675.000	DPMD	Kab.Jombang		

							Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	n/a	50 laporan	10.000	DPMD	Kab.Jombang								
							Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	n/a	3 dok	25.000	3 dok	25.000	DPMD	Kab.Jombang						
							Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	n/a	302 dok	50.000	302 dok	50.000	DPMD	Kab.Jombang						
							Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	n/a	302 orang	140.000	302 orang	140.000	DPMD	Kab.Jombang						

						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	n/a	100 desa	250.000	37 desa	250.000	41 desa	250.000	302 desa	250.000	DPMD	Kab.Jombang
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	n/a	302 laporan	30.000	DPMD	Kab.Jombang						
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	n/a	2 dok	45.000	DPMD	Kab.Jombang						
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	n/a	1 dok	250.000	1 dok	250.000	1 dok	250.000	3 dok	250.000	DPMD	Kab.Jombang





						<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<i>Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa</i>	n/a	76.43%	175.000	76.43%	175.000	76.43%	175.000	76.43%	175.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>	
						<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<i>Jumlah desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas dana desa</i>	n/a	302 desa	175.000	175.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>						
						<i>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>	n/a	1175 unit	175.000	175.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>						
						<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT</b>	<i>Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif</i>	n/a	100%	305.000	100%	305.000	100%	305.000	100%	305.000	305.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>

						<b>HUKUM ADAT</b>												
						<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	n/a	302 desa	305.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>						
						<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan</b>	n/a	7 lembaga	125.000	<b>DPMD</b>	<b>Kab.Jombang</b>						

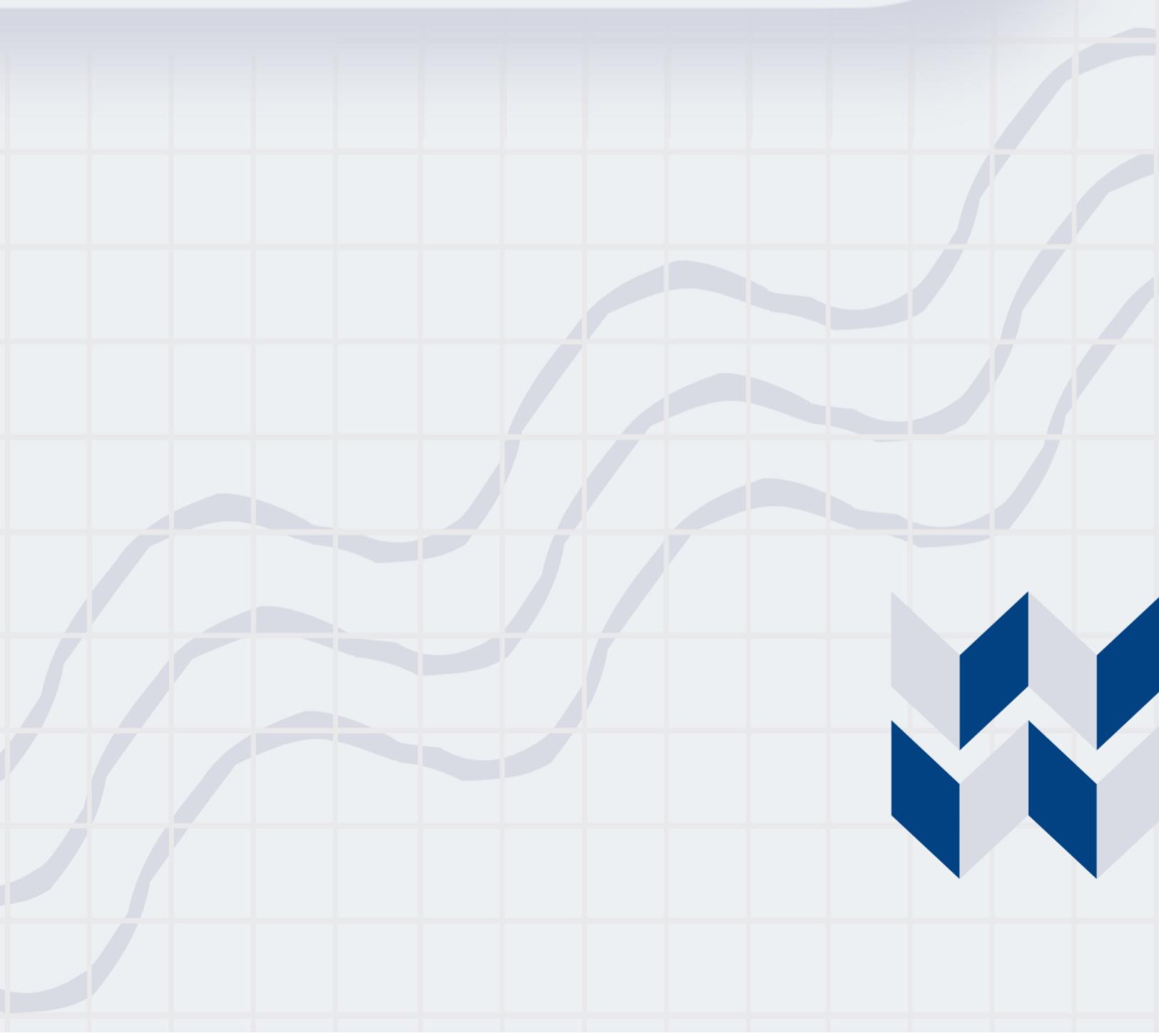
						Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya											
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	n/a	1 laporan	30.000	DPMD	Kab.Jombang						
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan	n/a	1 laporan	75.000	DPMD	Kab.Jombang						

							Royong Masyarakat	Bhakti Gotong Royong Masyarakat											
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	n/a	1 dok	75.000	DPMD	Kab.Jombang						



# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.

Tabel TC.28 Indikator Kinerja  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

NO	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	REALISASI KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DPMD	52,99	0	52,99	82.20	75	80,1	80,1
2	Jumlah Desa Mandiri	47 desa	23 desa	47desa	91 desa	58 desa	62 desa	62 desa
3	Persentase desa yang meningkat statusnya	37%	n/a	n/a	47%	57%	65%	65%
4	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	IPP Desa	2.86	2,86	2,90	2.94	2.96	3.04	3.04
6	IKM Desa	83.63	83,63	83,75	84.1	84.25	84.3	85
7	Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	n/a	n/a	n/a	20.50%	23.80%	27.10%	27.10%
9	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	86.70%	33%	66%	91.50%	93.80%	100%	100%
10	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76.43%	n/a	n/a	76.43%	76.43%	76.43%	76.43%
11	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%



# BAB VIII

## PENUTUP



**BAB VIII  
PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah yang secara operasional akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang 2024-2026.

Jombang, 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
KABUPATEN JOMBANG**



**SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, SSTP, M. Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19791208 200003 1 001**